

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian ini penulis tidak lepas dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebelumnya yaitu sebagai berikut:

1. Pratiwi dan Poernomo (2009)

Pratiwi dan Poernomo (2009) melakukan penelitian mengenai pengaruh *earning power* terhadap praktik manajemen laba. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan hubungan *earning power* terhadap praktik manajemen laba dan seberapa besar *earning power* mempengaruhi manajer dalam melaporkan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2005. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan distribusi *chi kuadrat* yaitu *statistic no parametric*. Variable-variabel yang digunakan adalah *earning power* sebagai variabel independen dan manajemen laba sebagai variabel dependennya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengemukakan bahwa *earnings power* mempengaruhi manajer untuk menerapkan kebijakan *income increasing accrual* ataupun *income decreasing accrual*.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Poernomo (2009) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan variabel dependen yaitu manajemen laba dan *earning power* sebagai variabel independen.

Perbedaan :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pratiwi dan Poernomo (2009) menggunakan distribusi *chi kuadrat* yaitu *statistic no parametric* sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
2. Obyek penelitian pada penelitian terdahulu menggunakan perusahaan sektor manufaktur di BEI hanya pada satu periode yaitu tahun 2005 sedangkan pada penelitian ini dilakukan selama tiga periode dimulai tahun 2008 hingga 2010.
3. Proksi perhitungan *earning power* menggunakan NPM pada penelitian terdahulu sedangkan penelitian ini menggunakan ROA.

2. Utami dan Rahmawati (2008)

Utami dan Rahmawati (2008) melakukan penelitian mengenai pengaruh komposisi dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap aktivitas manajemen laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh komposisi dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap aktivitas manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama periode 2000 hingga 2004. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Variabel-variabel independen terdiri dari komposisi dewan komisaris dan keberadaan komite audit sedangkan variabel dependen adalah manajemen laba. Hasil penelitian ini menunjukkan komposisi dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dalam hal ini keberadaan pihak independen dalam komisaris mampu mengurangi tindak

manajemen laba yang terjadi dalam perusahaan manufaktur. Akan tetapi, keberadaan komite audit dalam perusahaan manufaktur ternyata tidak mampu mengurangi manajemen laba dalam perusahaan yang dibuktikan dengan tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Utami dan Rahmawati (2008) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan :

1. Pada penelitian terdahulu komposisi dewan komisaris dan keberadaan komite audit merupakan variabel independen. Akan tetapi, pada penelitian ini kedua variabel independen tersebut menjadi variabel pemoderasi yang diduga ikut memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen.
2. Obyek penelitian terdahulu menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2000 hingga 2004 sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 hingga 2010.

3. Nasution dan Setiawan (2007)

Nasution dan Setiawan (2007) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*, seperti, komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan perbankan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Penelitian ini

menggunakan data sekunder dari laporan seluruh perusahaan perbankan yang terdaftar dalam Bursa Efek Jakarta selama periode 2000 hingga 2004. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Variabel-variabel independen terdiri dari mekanisme *corporate governance*, seperti komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit dengan variabel dependen adalah praktek manajemen laba. Hasil dari penelitian ini antara lain menemukan bahwa komposisi dewan komisaris independen berpengaruh negatif secara signifikan terhadap manajemen laba, ukuran dewan komisaris berpengaruh positif secara signifikan terhadap praktik manajemen laba, keberadaan komite audit berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap praktik manajemen laba.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Nasution dan Setiawan (2007) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode regresi linier berganda dan sama-sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen.

Perbedaan :

1. Pada penelitian terdahulu mekanisme *corporate governance*, seperti komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit sebagai variabel independen. Akan tetapi, pada penelitian ini sebagian variabel independen tersebut yaitu proporsi komisaris independen dan komite audit menjadi variabel pemoderasi yang diduga ikut memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen.

2. Obyek penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perbankan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2000 hingga 2004 sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 hingga 2010.

4. Rahmawati (2006)

Rahmawati (2006) melakukan penelitian mengenai pengaruh asimetri informasi terhadap manajemen laba pada perusahaan perbankan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Tujuan penelitian ini untuk memberikan bukti empiris mengenai asimetri informasi dan pengaruhnya terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan perbankan *go public* di Indonesia. Sampel penelitian ini yaitu data sekunder berupa laporan keuangan tahunan yang diterbitkan oleh perusahaan perbankan *go public* yang terdapat di Bursa Efek Jakarta (BEJ) selama tahun 2000 sampai 2004. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *least squares*. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu manajemen laba yang diprediksikan dipengaruhi oleh variabel independen yaitu asimetri informasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa variabel independen asimetri informasi memiliki pengaruh secara positif signifikan terhadap variabel dependen yaitu manajemen laba.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2006) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan manajemen laba sebagai variabel dependen dan asimetri informasi sebagai variabel independen.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2006) menggunakan *least squares* yaitu *statistic no parametric* sedangkan penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda.
2. Obyek penelitian terdahulu menggunakan perusahaan perbankan *go public* yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) tahun 2000 hingga 2004 sedangkan pada penelitian ini menggunakan perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2008 hingga 2010.

5. Veronica dan Bachtiar (2004)

Veronica dan Bachtiar melakukan penelitian mengenai pengaruh manajemen laba terhadap *Good Corporate Governance* dan asimetri informasi pada semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) kecuali perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, telekomunikasi, serta perusahaan *real estate* dan *property*. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki hubungan antara *Good Corporate Governance*, informasi asimetri dan manajemen laba serta menguji dampak praktek *Good Corporate Governance* pada tingkat *discretionary accrual* dan akhirnya mempengaruhi reaksi pasar. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan perusahaan yang terdaftar di BEJ pada tahun 2001 dan 2002. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan regresi linear berganda. Variable-variable yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* seperti keberadaan komite audit, kualitas audit, anggota dewan independen, dan kepemilikan institusional sebagai variable independennya dan manajemen laba sebagai variable dependennya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa asimetri

informasi berpengaruh positif dan signifikan dengan manajemen laba. Namun variabel mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional, kualitas audit, dan proporsi komisaris independen) tidak berpengaruh signifikan dengan manajemen laba, hanya variabel komite audit yang menunjukkan pengaruh signifikan. Interaksi antara variabel *discretionary accrual* dan komite audit serta dewan independen memiliki korelasi positif yang signifikan dengan *return*. Hal ini menunjukkan manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki komite audit dan persentase yang lebih tinggi dari anggota dewan independen akan dinilai positif oleh pasar karena pasar memandang manajemen laba sebagai hasil dari motivasi yang efisien dan *return* pada akhirnya akan meningkat.

Persamaan :

Penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Bachtiar (2004) dengan penelitian ini adalah sama-sama menggunakan metode regresi linier berganda dan sama-sama menggunakan asimetri informasi sebagai variabel independen.

Perbedaan :

1. Objek penelitian yang dilakukan oleh Veronica dan Bachtiar (2004) menggunakan semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (BEJ) yang tidak teregulasi dan non-keuangan yang memiliki tahun fiskal berakhir 31 Desember 2001 dan 2002 sedangkan pada penelitian ini terbatas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008 hingga 2010.
2. Pada penelitian terdahulu, variabel dependen terdiri dari manajemen laba dan nilai perusahaan sedangkan penelitian ini hanya menggunakan satu variabel yaitu manajemen laba. Selain itu sebagian variabel independen pada penelitian

terdahulu terdiri dari mekanisme *corporate governance* (proporsi komisaris independen dan komite audit) menjadi variabel pemoderasi yang diduga ikut memperkuat atau memperlemah pengaruh variabel independen..

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Perspektif *agency theory* merupakan dasar yang digunakan untuk memahami mekanisme *corporate governance* dan *earnings management*. Scott (2009:313) menyatakan bahwa *agency theory* merupakan cabang dari *game theory* yang mempelajari bentuk (desain) kontrak yang dapat memotivasi agent untuk bertindak demi kepentingan *principal* meskipun kepentingan *agent* bertentangan dengan kepentingan *principal*. Kontrak yang terpenting adalah *employment contract* (perusahaan dan manajemen) dan *lending contract* (perusahaan dan pemberi pinjaman). Selain itu, Anthony dan Govindarajan (2000:522) menyatakan *agency theory* adalah sebuah kontrak yang melandasi hubungan antara manajemen (*agent*) dengan pemegang saham (*principal*). *Agent* melakukan tugas sesuai dengan kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otoritas yang menjadi keharusan dalam rangka pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*.

Agency theory memiliki asumsi bahwa baik pemegang saham maupun manajemen termotivasi untuk berperilaku mengutamakan kepentingan pribadi (*self-interested behaviour*). Eisenhardt (1989) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007:5) mengemukakan bahwa *agency theory* menggunakan asumsi tiga sifat dasar manusia yang terdiri dari (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi

masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut, informasi yang dihasilkan antara satu individu untuk individu yang lainnya dipertanyakan reliabilitasnya apakah informasi tersebut dapat dipercaya atau tidak.

Principal tidak memiliki informasi yang cukup untuk mengetahui kinerja *agent*. sedangkan *agent* mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Hal inilah yang mengakibatkan adanya ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh *principal* dan *agent*. Ketidakseimbangan informasi inilah yang disebut dengan asimetri informasi (*asymmetric information*). Adanya asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan dirinya sendiri, mengakibatkan *agent* memanfaatkan adanya asimetri informasi yang dimilikinya untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak diketahui *principal*. Asimetri informasi dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) yang terjadi antara *principal* dan *agent* mendorong *agent* untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya kepada *principal*, terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja *agent*.

2.2.2 Asimetri Informasi (*Asymmetric Information*)

Agency theory mengimplikasikan adanya *asymmetric information* antara manajer (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Asimetri informasi (*asymmetric information*) adalah suatu keadaan dimana *agent* mempunyai informasi yang lebih banyak tentang perusahaan dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan dengan *principal* (Arifin, 2007:168). Kondisi ini memberikan kesempatan kepada *agent* menggunakan informasi yang diketahuinya untuk memanipulasi pelaporan

keuangan sebagai usaha untuk memaksimalkan kemakmurannya. Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Menurut Scott (2009:13), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

1. *Adverse selection*, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan pihak luar. Dan mungkin terdapat fakta-fakta yang tidak disampaikan kepada *principal*.
2. *Moral hazard*, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh investor (pemegang saham, kreditor), sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

Berdasarkan teori *market microstructure* mengatakan bahwa *adverse selection* lebih terkait dengan masalah yang dihadapi pengambil keputusan yaitu adanya kemungkinan informasi *firm-specific* yang material tidak diungkapkan ke publik. Informasi yang disimpan tersebut mungkin dapat tersedia secara khusus bagi investor yang mengeluarkan banyak biaya untuk pencarian informasi. Ketika terdapat ketidakpastian tentang adanya informasi, perusahaan secara konsisten memberikan pengungkapan yang tidak lengkap, maka investor akan meningkatkan *bid-ask spread* untuk meniadakan kemungkinan kerugian dari perdagangan dengan investor yang lebih terinformasi (*informed traders*) dengan keuntungan dari perdagangan dengan *liquidity traders*. Oleh karena itu, dalam

jangka panjang, ketika terdapat kemungkinan informasi *firm-specific* yang material tentang perusahaan tetapi tidak diungkapkan, maka *bid-ask spread* merupakan proksi dari asimetri informasi antara manajer dan perusahaan.

Menurut O'hara (1995) dalam Rahmawati (2006:10), teori *market microstructure* mengenai *bid-ask spread* menyatakan bahwa terdapat suatu komponen *spread* yang turut memberikan kontribusi pada kerugian yang dialami *dealer* ketika bertransaksi dengan *informed traders* adalah sebagai berikut :

1. Biaya pemrosesan pesanan (*order processing cost*), terdiri dari biaya yang dibebankan oleh pedagang sekuritas (efek) atas kesiapannya mempertemukan pesanan pembelian dan penjualan, dan kompensasi untuk waktu yang diluangkan oleh pedagang sekuritas guna menyelesaikan transaksi.
2. Biaya pemilikan saham (*inventory holding cost*), yaitu biaya yang ditanggung oleh pedagang sekuritas untuk membawa persediaan saham agar dapat diperdagangkan sesuai dengan permintaan.
3. *Adverse selection component*, menggambarkan suatu upah (*reward*) yang diberikan kepada pedagang sekuritas untuk mengambil suatu risiko ketika berhadapan dengan investor yang memiliki informasi superior. Komponen ini berhubungan dengan penyediaan informasi di pasar modal sehingga menjadi fokus perhatian utama akuntan berkaitan dengan *bid-ask spread*.

Bid-ask spread merupakan salah satu pengukur dari likuiditas pasar yang telah digunakan secara luas dalam penelitian terdahulu sebagai pengukur asimetri informasi antara pihak manajemen dan pemegang saham perusahaan (Rahmawati, 2006:10). Asimetri informasi dihitung dengan proksi *bid-ask spread* sebagai rata-

rata selama 12 bulan (Januari-Desember) untuk tiap tahun periode. Menurut Siregar (2002:8), *relative bid-ask spread* yang dioperasionalkan seperti dalam Komalsari dan Baridwan (2000) dan Mardiyah (2001) sebagai berikut :

$$\text{SPREAD}_{i,t} = (\text{ask}_{i,t} - \text{bid}_{i,t}) / \{(\text{ask}_{i,t} + \text{bid}_{i,t}) / 2\} \times 100$$

Keterangan:

$\text{bid}_{i,t}$ = harga *bid* terendah saham perusahaan i yang terjadi pada bulan t

$\text{ask}_{i,t}$ = harga *ask* tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada bulan t

Dengan demikian adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri. Jensen dan Meckling (1976) serta Watts dan Zimmerman (1986) dalam Herawaty (2008:99) menyatakan bahwa laporan keuangan yang dibuat dengan angka-angka akuntansi diharapkan dapat meminimalkan konflik diantara pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan laporan keuangan yang dilaporkan oleh *agent* sebagai pertanggung jawaban kinerjanya, *principal* dapat menilai, mengukur dan mengawasi sampai sejauh mana *agent* tersebut bekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya serta sebagai dasar pemberian kompensasi kepada *agent*.

2.2.3 Laporan Keuangan

Menurut Kieso *et al* (2007:2), laporan keuangan merupakan suatu sarana yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengkomunikasikan informasi keuangannya terhadap pihak eksternal yang tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya pada perusahaan, terutama bagi investor untuk mengetahui perkembangan perusahaan secara periodik (Samsul (2006:128). Sedangkan

menurut Fraser dan Ormiston (2007:1), sebagai peta, laporan keuangan membentuk dasar untuk memahami posisi keuangan suatu perusahaan, menilai kinerja yang telah lampau dan prospek kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Laporan keuangan memiliki kemampuan untuk menyajikan kondisi keuangan suatu perusahaan guna memberikan keputusan bisnis yang informatif.

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat pengkomunikasian data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, baik pihak intern maupun ekstern dalam rangka pengambilan keputusan dengan data atau aktivitas keuangan tersebut. Melalui laporan keuangan, pihak-pihak yang berkepentingan tersebut akan dapat melakukan pengukuran dan analisis terhadap keberhasilan atau kegagalan perusahaan.

2.2.4 Tujuan Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 (2007:1.2), tujuan laporan keuangan yaitu: "Untuk tujuan umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber-sumber daya yang dipercayakan kepada mereka". Selain itu, Nikolai *et al* (2007:35) juga memaparkan tujuan laporan keuangan, antara lain:

- a) Membantu investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lain yang potensial untuk membuat keputusan investasi yang rasional, memberikan kredit dan keputusan-keputusan yang lain.

- b) Membantu investor, kreditor, dan pengguna laporan keuangan lain yang potensial untuk menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian pengeluaran kas berasal dari deviden atau bunga dan hasil penjualan, pemenuhan kewajiban atau jatuh tempo dari sekuritas atau pinjaman.
- c) Menggambarkan dengan jelas sumber daya-sumber daya ekonomi dari suatu perusahaan, pengakuan pada sumber-sumber tersebut, efek-efek dari transaksi, peristiwa-peristiwa, dan lingkungan yang mengubah sumber-sumber tersebut.

Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran atau laporan kemajuan (*progress report*) secara periodik yang dilakukan oleh pihak manajemen yang bersifat historis dan menyeluruh. Laporan keuangan disusun setiap akhir periode akuntansi, yaitu triwulan, semester atau tahunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan yang bersangkutan.

2.2.5 Komponen Laporan Keuangan

Menurut PSAK No.1 (2007:2), laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini, yaitu:

- a) Neraca
- b) Laporan Laba Rugi
- c) Laporan Perubahan Ekuitas
- d) Laporan Arus Kas
- e) Catatan Atas Laporan Keuangan

Berdasarkan penjabaran komponen-komponen diatas terlihat bahwa laporan keuangan terdiri dari neraca, perhitungan rugi laba serta laporan perubahan modal. Neraca menunjukkan jumlah aktiva, hutang dan modal dari suatu

perusahaan pada tanggal tertentu, perhitungan (laporan) laba rugi memperlihatkan hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan serta biaya yang terjadi selama periode tertentu, dan laporan perubahan modal menunjukkan sumber dan penggunaan atau alasan-alasan yang menyebabkan perubahan modal perusahaan. Dalam prakteknya, informasi tersebut beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan dapat membantu pemakai laporan dalam memprediksi arus kas masa depan khususnya dalam hal waktu dan kepastian perolehan kas dan setara kas.

2.2.6 Laba (*Earnings*)

Laba (*earnings*) merupakan bagian dari ikhtisar keuangan yang terdapat dalam laporan laba rugi yang memiliki banyak kegunaan dalam berbagai konteks. *Earnings (net income)* adalah selisih antara total *revenues* dan total *expenses* pada satu periode akuntansi (Belkaoui, 2007:50). Menurut Fraser dan Ormiston (2007:101), *earnings* atau “*the bottom line*” menyatakan laba perusahaan sesudah mempertimbangkan semua beban dan pendapatan yang dilaporkan selama periode akuntansi. Sedangkan, pengertian laba menurut Harahap (2007:241) adalah sebagai berikut : “Laba adalah jumlah yang berasal dari pengurangan harga pokok produksi, biaya lain, dan kerugian dari penghasilan atau penghasilan operasi.”

Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa laba merupakan kenaikan dari nilai harga dari hasil penjualan produk dan jasa atau selisih antara harga jual dan harga beli yang dikeluarkan guna tercapainya laba yang maksimum. Apabila laba tersebut telah tercapai maka dapat dikatakan perusahaan tersebut mengindikasikan kesuksesan. Walaupun tidak semua perusahaan

menjadikan laba sebagai tujuan utama tetapi dalam mempertahankan usaha suatu perusahaan memerlukan laba. Laba merupakan bagian dari ikhtisar keuangan yang umumnya dipandang sebagai dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembagian deviden, pedoman investasi, dan pengambilan keputusan.

2.2.7 Jenis-Jenis Laba (*Types of Earnings*)

Apabila ditinjau dari komponen-komponen laporan keuangan terdapat, berbagai jenis laba. Jenis-jenis laba dalam kaitannya dengan perhitungan laba rugi tersebut, menurut Tuanakotta (2004:157) mengemukakan jenis-jenis laba adalah laba kotor, laba dari operasi dan laba bersih operasi. Adapun penjelasan dari jenis-jenis laba diatas adalah sebagai berikut :

1. Laba kotor (*gross profit*) adalah perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan.
2. Laba dari operasi (*cash from operating activities*) adalah selisih antara laba kotor dengan total beban operasi.
3. Laba bersih (*net income*) adalah angka terakhir dalam perhitungan laporan laba rugi dimana untuk mencerminkan laba operasi ditambah pendapatan lain-lain dikurangi beban lain-lain.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap jenis laba mempunyai suatu perhitungan sendiri dan dapat disimpulkan pula bahwa istilah laba berbeda-beda, namun pada dasarnya mempunyai maksud yang sama dalam meninjau potensi suatu perusahaan. Oleh karena itu, laba sangat penting bagi investor dan kreditor untuk mengevaluasi kinerja manajemen, memperkirakan

earnings power (memprediksi laba) dan deviden di masa mendatang serta proyeksi pertumbuhan perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006:2).

2.2.8 Earnings Power

Calon pemodal (pembeli saham) akan lebih berkepentingan dengan prospek keuntungan (laba) perusahaan guna untuk mengetahui investasi yang akan mereka dapatkan di masa yang akan datang. Pada umumnya salah satu aspek yang digunakan oleh pelaku pasar dalam menilai prospek suatu perusahaan adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba (*earnings power*). Menurut Riyanto (2008:37) "*earnings power* adalah kemampuan untuk mengetahui efisiensi perusahaan dengan melihat besar kecilnya dalam menghasilkan laba". Investor beranggapan bahwa *earnings power* yang tinggi akan menjamin pengembalian investasi serta akan memberikan keuntungan yang layak, oleh karena itu perusahaan harus menampilkan kinerja manajemen yang baik sehingga *earnings power* perusahaan dapat dilihat maksimal.

Menurut Riyanto (2008:43) menyatakan bahwa perhitungan *earnings power* atas dasar suatu sistem analisa yang dimaksudkan untuk menunjukkan efisiensi perusahaan yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan. Tinggi rendahnya *earnings power* dapat ditentukan oleh beberapa faktor yang bisa dilihat dari rasio keuangan yaitu melalui rasio profitabilitas. Sartono (2001:119) berpendapat bahwa profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) pada tingkat penjualan, aktiva, dan modal.

Terdapat tiga rasio yang dapat digunakan dalam rasio profitabilitas, yaitu rasio *profit margin*, *return on asset* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Menurut Anastasia *et al* (2003:128,131) rasio yang sering digunakan oleh calon pemodal adalah ROA sebagai salah satu indikator *earnings power* perusahaan yang mencerminkan kinerja manajemen dalam menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki dalam menghasilkan laba serta mempunyai pengaruh yang dominan terhadap harga saham. Rasio ini mampu mewujudkan hubungan investasi baru yang ditunjukkan pada arus kas bersih dikaitkan dengan total aktiva yang digunakan perusahaan. Hasil positif menunjukkan bahwa semakin tinggi *earnings power* semakin efisien laba usaha yang dilihat dari aktiva.

Menurut Hanafi (2005:84), rasio profitabilitas diukur dengan *return on asset* (ROA) menunjukkan kemampuan dari modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva untuk menghasilkan keuntungan bagi semua investor (pemegang obligasi dan saham) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Return On Asset (ROA)} = \frac{\text{EarningsAfterTax}}{\text{TotalAssets}} \times 100\%$$

Berdasarkan pengertian profitabilitas diketahui bahwa jika perusahaan mampu menghasilkan *return on asset* dengan baik maka perusahaan mampu menghasilkan modal dan memberikan keuntungan yang baik. Hal ini akan mendorong investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut sehingga harga saham perusahaan akan cenderung mengalami kenaikan. Semakin tinggi rasio ini menunjukkan bahwa perusahaan semakin efektif dalam memanfaatkan aktiva untuk menghasilkan laba bersih setelah pajak. Semakin tinggi ROA, kinerja perusahaan semakin efektif dan akan meningkatkan daya tarik perusahaan kepada

investor karena tingkat pengembalian akan semakin besar. Investor beranggapan bahwa *earnings power* yang tinggi akan menjamin pengembalian investasi dan memberikan keuntungan yang layak. *Earnings power* diduga mempengaruhi *earnings management* karena terkait langsung dengan objek modifikasi laba.

2.2.9 Earnings Management

Tindakan manajemen dalam melakukan *earnings management* sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Menurut Scott (2006:344), definisi *earnings management* adalah:

“Earning management is the choice by a manager of accounting policies so as to achieve some spesific objective.”

Berdasarkan definisi diatas, *earnings management* yaitu pilihan seorang manajer untuk kebijakan akuntansi sehingga mencapai beberapa tujuan spesifik yang dapat dilihat dari dua hal, antara lain *financial reporting* dan *contracting perspective* dalam Scott (2006:343). Sedangkan, *earnings management* menurut Kieso *et al* (2007:128), yaitu:

“Earnings management is the planned timing of revenue, expenses, gains, and losses to smooth out bumps in earnings.”

Earnings management diartikan bahwa manajer dapat memilih kebijakan akuntansi yang paling sesuai untuk dapat memaksimalkan kesejahteraan dan nilai pasar perusahaan dari suatu standar tertentu yang berkaitan dengan waktu pengakuan pendapatan, beban, laba atau kerugian. Pilihan kebijakan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu metode akuntansi dan *discretionary accruals*. Beberapa definisi lain *earnings management* antara lain:

a) Menurut Schipper (1989) dalam Wild *et al* (2007:86)

“Earnings management is purposeful intervention by management in the earning determination process, usually to satisfy selfish objectives.”

b) Menurut Schroeder (2005: 149)

“Earnings management is defined as the attempt by corporate officers to influence short term reported income.”

Pada dua definisi terakhir di atas, definisi pertama mendukung *earnings management* sebagai pilihan manajemen dalam kebijakan akuntansi dengan meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan untuk mencapai tujuan yang spesifik atau kepentingan pribadi. Sedangkan, definisi kedua menyatakan *earnings management* adalah suatu bentuk manipulasi laba untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara mempengaruhi pendapatan yang dilaporkan dalam jangka pendek. Dengan demikian, berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *earnings management* merupakan intervensi yang disengaja oleh pihak manajemen dalam proses pelaporan keuangan perusahaan kepada pihak eksternal perusahaan yang memanfaatkan *judgement* untuk mempengaruhi keputusan para penggunanya serta demi memperoleh kepentingan pribadi.

2.2.10 Pola *Earnings Management*

Empat pola *earnings management* dalam Scott (2006:345), yaitu:

1. *Taking a Bath*

Pola ini terjadi selama ada tekanan dari organisasi atau pergantian manajemen baru (*“organization stress* atau *reorganizations*”). Apabila perusahaan harus melaporkan kerugian yang besar maka manajemen akan menghapus sebagian *asset* yang akan menghasilkan biaya-biaya pada periode mendatang (*expected*

future costs) dan menyimpan pendapatan di masa mendatang (*future earnings "in the bank"*).

2. *Income Minimization*

Pola ini mungkin diterapkan pada perusahaan yang *politically visible* selama periode profitabilitas yang tinggi. Beberapa kebijakan yang diambil misalnya untuk meminimalkan beban pajak yang akan dibayar, yaitu berupa penghapusan barang modal dan *intangible asset*, pembebanan biaya iklan, biaya riset dan pengembangan, dan penggunaan metode *successful efforts* untuk biaya eksplorasi minyak dan gas.

3. *Income Maximization*

Manajemen menggunakan pola ini dalam melaporkan *net income* supaya mendapatkan bonus yang besar, dimana laba yang dilaporkan tetap berada di bawah batas atas yang telah ditetapkan dan untuk menghindari dari pelanggaran perjanjian utang (*debt covenant*) jangka panjang.

4. *Income Smoothing*

Manajer tipe *risk averse (contracting perspective)* cenderung memilih pola ini ketika melakukan perjanjian pinjaman jangka panjang untuk mengurangi gejolak dalam pelaporan laba, sehingga perusahaan terlihat stabil atau tidak berisiko tinggi.

2.2.11 Motivasi *Earnings Management*

Menurut Scott (2006:353), terdapat tiga motivasi untuk melakukan *earnings management*, antara lain :

1. *To meet investor's earnings expectations*

Manajemen mempunyai motivasi yang besar untuk memastikan bahwa harapan investor dapat terpenuhi. Salah satunya adalah dengan melakukan manipulasi terhadap laba untuk memperoleh respon yang baik dari pasar modal. Dengan demikian, harga saham akan meningkat dan investor bersedia menanamkan modalnya karena menilai perusahaan yang profitabilitasnya baik kemungkinan dapat memberikan *return* yang diharapkan di masa mendatang.

2. *Other Contractual Motivations*

a) *Debt Covenant Contract*

Perusahaan termotivasi melakukan *earnings management* untuk menghindari terjadinya pelanggaran perjanjian dalam kontrak (*debt covenant*) yang akan menimbulkan *cost*. *Debt covenant* didasarkan pada variabel akuntansi yang timbul dari masalah diantara manajemen dengan pemilik dana (pemberi pinjaman). Oleh karena itu, dalam kontrak pinjaman jangka panjang memuat perjanjian untuk melindungi kepentingan kedua belah pihak, seperti *excess dividend*, tambahan pinjaman seperti *working capital* atau ekuitas pemegang saham di bawah level tertentu.

b) *Implicit Contract*

Implicit contract atau *relational contract* mendorong terjadinya *earnings management*. *Implicit contract* timbul dari hubungan berkelanjutan antara perusahaan dengan *stakeholders*-nya berdasarkan persetujuan bisnis di masa lalu, misalnya perusahaan yang memiliki reputasi baik karena selalu

memenuhi komitmen kontrak formal akan memperoleh diskon yang besar dari supplier dan tingkat bunga pinjaman yang rendah dari kreditor.

3. *Initial Public Offerings* (IPO)

Perusahaan yang akan melakukan penawaran perdana sahamnya (*Initial Public Offerings* atau IPO) tidak memiliki harga pasar saham sehingga dibutuhkan sumber informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan seperti *net income* untuk membantu investor dalam menentukan nilai perusahaan. Hal tersebut akan mendorong manajemen untuk mengelola *earnings* dengan harapan perusahaan akan menerima harga saham yang tinggi di pasar modal.

2.2.12 Teknik *Earnings Management*

Beberapa teknik manajemen laba (*earnings management*) dapat mempengaruhi *earnings* yang dilaporkan oleh manajemen. Menurut Ayres (1994) dikutip oleh Gumanti (2000:108-109), terdapat tiga teknik perusahaan melakukan *earnings management*, yaitu:

1. *Accruals management*

Accruals management biasanya dikaitkan dengan segala aktivitas yang dapat mempengaruhi aliran kas dan keuntungan yang merupakan wewenang manajer (*managers' discretion*), antara lain mempercepat atau menunda pengakuan pendapatan (*revenues*), menganggap sebagai ongkos (beban biaya) atau suatu tambahan investasi atas suatu biaya (*amortize or capitalize of an investment*).

2. *Adoption of mandatory accounting changes*

Adoption of mandatory accounting changes berkaitan dengan keputusan manajer untuk menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang wajib diterapkan

oleh perusahaan, yaitu lebih awal, tepat waktu atau menundanya sampai saat berlakunya kebijakan tersebut.

3. *Voluntary accounting changes*

Voluntary accounting changes biasanya berkaitan dengan upaya manajemen untuk mengganti suatu metode akuntansi tertentu, misalnya mengubah metode penilaian persediaan dari *First In First Out (FIFO)* ke *Last In First Out (LIFO)* atau sebaliknya dan metode penyusutan *asset* dari metode garis lurus (*straight-line*) ke metode penyusutan yang dipercepat (*accelerated*) atau sebaliknya.

Berdasarkan beberapa teknik *earnings management*, Scott (2006:348) menggunakan pendekatan *accruals management* dengan memisahkan *accruals* menjadi *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*. *Discretionary accruals* atau *abnormal accruals* merupakan suatu kebijakan yang dapat dilakukan manajemen untuk mempengaruhi *earnings* perusahaan sesuai dengan yang diinginkan, misalnya penilaian piutang (peningkatan piutang bersih) dan pengakuan biaya garansi. Sedangkan *non-discretionary accruals* atau *normal accruals* merupakan *accruals* yang tidak dipengaruhi oleh manajemen karena terdapat aturan yang terkait dengan kegiatan bisnis perusahaan dan ditentukan oleh faktor-faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi atau permintaan terhadap penjualan serta faktor lain yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan seperti beban penyusutan atau amortisasi.

Dechow *et al* (1995) dalam Nuryaman (2008:12) menyatakan bahwa model *modified Jones* ternyata memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengukur *earnings management* melalui proksi *discretionary accruals*. Model

modified Jones dengan menggunakan pendekatan *cross-sectional* yang dikembangkan oleh Peasnell *et al* (2000) ternyata paling baik dalam mendeteksi manipulasi pendapatan dan *bad debt*. Pendekatan tersebut memfokuskan pada penggunaan komponen akrual modal kerja (*working capital accruals*) yang dinilai lebih tepat untuk menentukan nilai *discretionary accruals* sebagaimana yang telah dikaji oleh Peasnell *et al* (2000). *Discretionary accruals* tidak diestimasi berdasarkan kesalahan residual karena teknik tersebut dianggap relatif rumit, oleh karena itu digunakan proksi rasio akrual modal kerja dengan penjualan. Alasan pemakaian penjualan sebagai *deflator* akrual modal kerja adalah karena *earnings management* banyak terjadi pada akun penjualan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nelson *et al.* (2000). Penggunaan penjualan sebagai deflator juga dilakukan oleh Friedlan (1994) yang memodifikasi model DeAngelo (1986) menjadi rasio antara perubahan total akrual dengan penjualan (Utami, 2005:102-103).

Berdasarkan hasil penelitian Utami (2005) dalam Nuryaman (2008:13), pengukuran manajemen laba pada perusahaan-perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI) disarankan menggunakan model modifikasi Friedlan karena model ini memberikan *explanatory power* terbaik dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Manajemen laba (ML)} = \text{Akrual Modal kerja}_{(t)} / \text{Penjualan}_{(t)}$$

$$\text{Akrual modal kerja} = \Delta \text{AL} - \Delta \text{HL} - \Delta \text{Kas}$$

Keterangan:

$$\Delta \text{AL} = \text{Perubahan aktiva lancar pada periode } t$$

$$\Delta \text{HL} = \text{Perubahan hutang lancar pada periode } t$$

$$\Delta \text{Kas} = \text{Perubahan kas dan ekuivalen kas pada periode } t$$

Data akrual modal kerja dapat diperoleh langsung dari laporan arus kas aktivitas operasi, sehingga investor dapat langsung memperoleh data tersebut tanpa melakukan perhitungan yang rumit.

2.13 *Positive Accounting Theory (PAT)*

Penelitian mengenai *earnings management* sejalan dengan *Positive Accounting Theory (PAT)* atau teori akuntansi positif. Menurut Scott (2006:240), *Positive Accounting Theory (PAT)*, yaitu:

“Positive Accounting Theory (PAT) is concerned with predicting such actions as the choices of accounting policies by firm managers will respond to proposed new accounting standards.”

Berdasarkan definisi diatas, teori akuntansi positif memusatkan perhatian dengan memprediksi tindakan manajer perusahaan dalam memilih kebijakan akuntansi pada proses pembuatan laporan keuangan yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Watts dan Zimmerman (1990) dalam Scott (2006:243), menyatakan tiga hipotesis *Positive Accounting Theory (PAT)*, yaitu:

a) *The bonus plan hypothesis*

Manajer yang bekerja di perusahaan yang memberikan bonus cenderung memilih prosedur-prosedur akuntansi yang memindahkan pelaporan *earnings* dari periode mendatang ke periode saat ini. Hal tersebut dikarenakan dengan melaporkan *earnings* setinggi mungkin maka manajemen ingin mendapatkan bonus yang besar pada saat ini.

b) *The debt covenant hypothesis*

Semakin perusahaan cenderung melanggar perjanjian hutang, maka semakin besar kecenderungan manajer memilih prosedur-prosedur akuntansi yang

dapat memindahkan pelaporan *earnings* dari periode mendatang ke periode saat ini. Peningkatan *net income* yang dilaporkan akan mengurangi kejadian dimana perusahaan tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo (*technical default*).

c) *The political cost hypothesis*

Semakin besar *political cost* yang dihadapi perusahaan, maka manajer cenderung memilih prosedur-prosedur akuntansi yang menunda pelaporan laba dari periode saat ini ke periode mendatang. *Political costs* dapat disebabkan oleh profitabilitas perusahaan yang tinggi sehingga mengundang perhatian publik, terutama pemerintah. Pemerintah akan mengenakan pajak baru atau regulasi lainnya sehingga perusahaan berusaha melaporkan *earnings* yang rendah.

2.2.14 Corporate Governance

Corporate governance merupakan konsep yang didasarkan pada *agency theory* yang diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. *Corporate governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* pada 1992 dalam *Cadbury Report* yang mendefinisikan *corporate governance* (Arifin, 2005:11) sebagai berikut:

“Corporate governance is a set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”

Selain itu, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OCED) dalam Surya dan Yustiavandana (2006:35), menyatakan: “*Corporate governance* adalah sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. *Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja. *Corporate Governance* yang baik dapat memberikan rangsangan bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan, dan pemegang saham harus memfasilitasi pengawasan yang efektif sehingga mendorong perusahaan menggunakan sumber daya yang lebih efisien.” Beberapa institusi di Indonesia juga mengajukan definisi *corporate governance*, salah satunya *Indonesian Institute of Corporate Governance* (IICG) dikutip oleh Arifin (2005:12), mendefinisikan *corporate governance* sebagai: “Proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* yang lain. *Corporate governance* juga mensyaratkan adanya struktur perangkat untuk mencapai tujuan dan pengawasan atas kinerja.”

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, *corporate governance* merupakan upaya yang dilakukan oleh *stakeholders* untuk menjalankan perusahaan secara baik (*good*), sesuai dengan hak dan kewajibannya. Dengan demikian, maka muncul konsep *Good Corporate Governance* (GCG) yang merupakan syarat bagi perusahaan untuk mendapatkan kepercayaan investor di pasar modal sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan bagi pemegang saham. *Good Corporate*

Governance (GCG) merupakan suatu sistem pengelolaan perusahaan yang mencerminkan hubungan sinergi antara manajemen dan pemegang saham, kreditur, pemerintah dan *stakeholders* lainnya (Santoso dan Santi, 2008:5).

2.2.15 Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) pada tahun 1999 (direvisi pada tahun 2004) telah menerbitkan dan mempublikasikan *OECD Principles of Corporate governance* untuk membantu mengevaluasi dan meningkatkan rerangka hukum, institusional, dan regulatori *corporate governance* dan memberikan pedoman dan saran-saran untuk pasar modal, investor, perusahaan, dan pihak-pihak lain yang memiliki peran dalam pengembangan *corporate governance*. Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) Indonesia pada tahun 2006 telah mengeluarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang merupakan panduan bagi perusahaan dalam membangun, melaksanakan dan mengkomunikasikan praktik GCG kepada pihak yang kepentingan. Dalam pedoman tersebut, prinsip-prinsip GCG tersebut antara lain sebagai berikut (Solihin, 2009:125) :

1. Keterbukaan (*transparency*)

Perusahaan harus menyediakan informasi yang relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pihak-pihak lain yang berkepentingan untuk menjaga objektivitas dalam menjalankan bisnis. Selain itu, perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundangundangan, tetapi juga hal yang penting

untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

2. Akuntabilitas (*accountability*)

Perusahaan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. Pertanggung-jawaban (*responsibility*)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate governance*.

4. Kewajaran (*fairness*)

Perusahaan harus menekankan pada adanya perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

5. Independensi (*independency*)

Perusahaan harus dikelola secara independen tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

Berdasarkan Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) dinyatakan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan, dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan (Solihin, 2009:123). Proses untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG kedalam tubuh atau struktur suatu perusahaan memerlukan waktu yang panjang dan melalui proses yang kompleks serta memerlukan komitmen yang tinggi dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk terciptanya *Good Corporate Governance* (GCG). Untuk memastikan *good corporate governance* (GCG) dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan atau sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan maka diperlukan suatu *mekanisme corporate governance*.

2.2.16 Mekanisme *Corporate Governance*

Mekanisme merupakan cara kerja sesuatu secara tersistem untuk memenuhi persyaratan tertentu. Mekanisme *corporate governance* merupakan suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan kontrol atau pengawasan terhadap keputusan. Menurut Herawaty (2008:100) menyatakan bahwa *corporate governance* menghasilkan mekanisme yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa tindakan manajemen selaras dengan kepentingan *shareholders*. Mekanisme dalam pengawasan *corporate governance* dibagi dalam dua kelompok yaitu mekanisme *internal* dan *external mechanisms*.

Internal mechanisms adalah cara untuk mengendalikan perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham (RUPS), komposisi dewan direksi, komposisi dewan komisaris dan pertemuan dengan *board of director*. Sedangkan *external mechanisms* adalah cara mempengaruhi perusahaan dengan menggunakan pengendalian oleh pasar dan *level debt financing*. Surya dan Yustiavananda (2006:132) menyebutkan paling tidak diperlukan empat organ tambahan untuk melengkapi penerapan GCG, yaitu: komisaris independen, direktur independen atau direktur tidak terafiliasi, komite audit dan sekretaris perusahaan (*corporate secretary*).

2.2.17 Dewan Komisaris dan Komisaris Independen

Indonesia menganut sistem *continental* dimana *board of directors* dipisahkan menjadi dua lapis atau sering disebut *two tier boards* yaitu *supervisory boards* atau dewan komisaris dan *management board* atau direksi. Menurut Egon Zehnder (FCGI, 2003:5), dewan komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Anggota dewan komisaris terdiri dari *non executive members* atau komisaris independen yang diketuai oleh *chairman* atau komisaris utama, sedangkan *management board* diketuai oleh *Chief Executive Officer* (CEO) atau direktur utama. Adanya komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan peran dewan komisaris sehingga tercipta *Good Corporate Governance* (GCG) di dalam perusahaan karena komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi *monitoring*.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas) pasal 1 angka 5 dalam Djajil (2000:12), definisi komisaris independen adalah sebagai berikut:

“Anggota komisaris perusahaan tercatat yang memenuhi kondisi sebagai berikut, antara lain tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama perusahaan tercatat, tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur lainnya dan atau perusahaan tercatat dan tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lainnya yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat.”

Sedangkan menurut KNKG (2006:3), komisaris independen yaitu anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Tanggung jawab komisaris independen mencakup lima hal, antara lain berupa menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan perusahaan, perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholders* yang lain, diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, kepatuhan perusahaan pada perundangan dan peraturan yang berlaku dan menjamin akuntabilitas organ perseroan. Oleh karena itu, keberadaan komisaris independen bertujuan untuk menciptakan iklim yang lebih objektif dan independen, menjaga ”*fairness*” serta mampu memberikan keseimbangan dalam pengambilan keputusan khususnya perlindungan kepentingan *minority shareholder* dan *stakeholders* lainnya (Susiana dan Herawaty, 2007:9).

Pembentukan komisaris independen ini dimotivasi oleh keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap pemegang saham minoritas dalam PT terbuka. Berdasarkan keputusan Direksi BEJ (sekarang BEI) nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 yaitu Pencatatan Efek Nomor I-A, komisaris independen bertanggung jawab untuk mengawasi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi jika diperlukan. Seperti pada ketentuan di pasar modal dalam Surat Direksi BEJ (sekarang BEI) nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa poin C mengatur hal-hal mengenai komisaris independen, komite audit, dan sekretaris perusahaan yang menjelaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), perusahaan tercatat wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan sekurang-kurangnya 30 persen dari jumlah seluruh anggota komisaris. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komisaris independen merupakan sebuah badan dalam perusahaan yang beranggotakan dewan komisaris yang independen yang berasal dari luar perusahaan yang berfungsi untuk menilai kinerja perusahaan secara luas dan keseluruhan. Proporsi dewan komisaris independen dalam sebuah perusahaan harus sedemikian rupa untuk memungkinkan pengambilan putusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan fungsinya, dewan komisaris bekerja sama dengan komite audit dalam mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan.

2.2.18 Komite Audit

Keberadaan komite audit merupakan perangkat yang penting dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). BAPEPAM sebagai regulator pasar modal, mempunyai peranan penting dalam mengupayakan penerapan *good corporate governance* oleh Perusahaan Terbuka. Salah satu upaya yang dilakukan BAPEPAM adalah dengan menerbitkan Surat Edaran SE-03/PM/2000 tanggal 5 Mei 2000 yang merekomendasikan perusahaan terbuka membentuk komite audit. Hal senada juga dilakukan oleh BEJ (sekarang BEI) dengan mengeluarkan peraturan KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang *listed* di bursa memiliki komite audit. BAPEPAM dan BEI telah mengeluarkan peraturan yang memperkuat independensi dan efektivitas komite audit. Salah satunya yaitu mewajibkan perusahaan yang terdaftar di BEI memiliki komite audit. Namun, peraturan tentang keberadaan komite audit saja belum cukup untuk meningkatkan kualitas pengawasan terhadap kinerja perusahaan. Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-29/PM/2004, tertanggal 24 September 2004 pada Peraturan nomor IX.I.5 tentang Pembentukan dan Pelaksanaan Kerja Komite Audit, komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris yang tugasnya membantu dewan komisaris dengan memberikan pendapat professional yang independen untuk meningkatkan kualitas kerja serta mengurangi penyimpangan pengelolaan perusahaan.

Dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit dengan proporsi anggota eksternal yang cukup besar dan dengan pengetahuan serta pengalaman berkaitan

dengan perusahaan dan keuangannya, diharapkan dapat mengindikasikan adanya dugaan penyimpangan keuangan yang material dalam perusahaan. Hal ini dikarenakan komite audit lebih efektif dalam memonitor laporan keuangan perusahaan oleh Xie *et al* dalam Iqbal (2007:7). Ukuran komite audit dijelaskan dalam keputusan Direksi BEJ nomor: KEP-399/BEJ/07-2001 Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Huruf C, yaitu keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari tiga orang anggota, seorang di antaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstern yang independen dimana sekurang-kurangnya satu di antaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komite audit ternyata juga membutuhkan independensi dan efektivitasnya dalam mengawasi proses pelaporan keuangan, terutama dalam upaya mengawasi partisipasi manajemen dan auditor independen dalam proses pelaporan keuangan. Komite audit dan komisaris independen merupakan pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian untuk menciptakan keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Keempat faktor inilah yang membuat laporan keuangan menjadi lebih berkualitas.

2.2.19 Hubungan Asimetri Informasi Terhadap *Earnings Management*

Asimetri antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*) dapat memberikan kesempatan kepada manajer untuk melakukan manajemen laba (*earnings management*) dalam rangka menyesatkan pemilik (pemegang saham) mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Penelitian Richardson (1998) dalam

Ujiyantho dan Pramuka (2007:6) menunjukkan adanya hubungan positif antara asimetri informasi dengan *earnings management*. Dalam keadaan asimetri informasi yang tinggi, maka pemegang saham tidak mempunyai informasi yang cukup untuk mengetahui laba yang dimanipulasi oleh manajemen. Semakin besar asimetri informasi antara manajer dengan pemegang saham maka pihak manajemen cenderung melakukan *earnings management*.

Perusahaan yang melakukan *earnings management* akan mengungkapkan lebih sedikit informasi dalam laporan keuangan agar tindakannya tidak mudah terdeteksi. Namun terdapat kemungkinan sebaliknya, jika *earnings management* dilakukan untuk tujuan mengkomunikasikan informasi dan meningkatkan nilai perusahaan, maka seharusnya hubungan yang terjadi adalah positif. (Halim, 2005:118). Adanya asimetri informasi akan mendorong manajer untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja manajer. Oleh karena itu, adanya asimetri informasi memungkinkan manajemen untuk melakukan *earnings management*.

2.2.20 Hubungan *Earnings Power* Terhadap *Earnings Management*

Laporan keuangan digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan, dalam hal ini manajer sebagai pihak internal dan beberapa pihak diluar perusahaan yaitu para calon investor, pemegang saham dan kreditur ekstern perusahaan. Informasi laba menjadi perhatian utama untuk menaksir kinerja atau pertanggungjawaban manajemen dan membantu dalam menaksir *earnings power* untuk menilai efisiensi perusahaan dalam menghasilkan besar kecilnya laba perusahaan di masa yang akan datang.

Adanya kecenderungan lebih memperhatikan laba ini disadari oleh manajemen, khususnya manajer yang kinerjanya diukur berdasarkan informasi tersebut, sehingga mendorong timbulnya perilaku menyimpang (*dysfunctional behaviour*) demi memenuhi keuntungan pribadi dan nilai pasar perusahaan, salah satu bentuknya adalah manajemen laba (*earnings management*).

Berdasarkan pernyataan diatas, hasil penelitian yang dilakukan oleh Poernomo dan Pratiwi (2008) mengemukakan adanya pengaruh *earnings power* terhadap praktik *earnings management*. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa *earning power* perusahaan dapat mempengaruhi manajer untuk melakukan praktik manajemen laba, baik melalui menerapkan kebijakan *income increasing accrual* ataupun *income decreasing accrual*. Hal ini tergantung dari motivasi masing-masing perusahaan meskipun pengaruh tersebut cenderung lemah. Dengan demikian, *earnings power* perusahaan yang tinggi belum tentu mencerminkan kinerja perusahaan yang baik karena seringkali dijadikan sasaran dalam melakukan praktik *earnings management*.

2.2.21 Proporsi Komisaris Independen Terhadap Hubungan Asimetri Informasi dan *Earnings Power* Dengan *Earnings Management*

Keberadaan komisaris independen telah diatur Bursa Efek Jakarta (sekarang berubah menjadi Bursa Efek Indonesia) No. I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek bersifat ekuitas di bursa yang berlaku sejak 1 Juli 2000. Perusahaan publik harus mempunyai komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah minimal komisaris independen adalah

30 persen dari seluruh anggota dewan komisaris (Herwijayatmo, 2000:29). Proporsi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan (*outsider director*) yang bersifat independen dan berkompotensi dapat memberikan kontribusi yang efektif dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap manajemen terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas untuk membatasi *earnings management*. Hal tersebut dinyatakan oleh Kao dan Chen (2004) dan Sarkar (2006) dalam Nuryaman (2008:7-8).

Pemikiran tersebut mendukung Dechow *et al* (1996), Chtourou *et al* (2001), Klein (2002) dan Xie *et al* (2003), bahwa perusahaan yang memiliki komposisi *outsider director* yang meningkatkan fungsi pengawasan dapat mempengaruhi tindakan *earnings management* yang berhubungan dengan semakin rendahnya penggunaan *discretionary accruals* (Ujiyantho dan Pramuka, 2007:8). Berkaitan dengan independensi, komisaris independen yang merupakan bagian dari dewan komisaris, secara umum mempunyai pengawasan yang lebih baik terhadap manajemen. Hal ini akan mengurangi kemungkinan kecurangan dalam menyajikan laporan keuangan yang mungkin dilakukan manajemen, karena pengawasan yang dilakukan oleh anggota komisaris lebih baik dan bebas dari berbagai kepentingan intern dalam perusahaan. Selain itu, melalui peranan dewan komisaris dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap operasional perusahaan oleh pihak manajemen, komposisi (proporsi) dewan komisaris dapat memberikan kontribusi yang efektif terhadap hasil dari proses penyusunan laporan keuangan yang berkualitas atau kemungkinan terhindar dari kecurangan laporan keuangan.

Komisaris independen merupakan posisi terbaik sebagai pengawas kebijakan manajemen dan memberi nasihat kepada manajemen yang bertindak sebagai wakil dari pemegang saham serta sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal supaya tercipta perusahaan yang *Good Corporate Governance* (GCG). Dengan demikian, komposisi dewan komisaris yang terdiri dari anggota yang berasal dari luar perusahaan (komisaris independen) mempunyai kecenderungan mempengaruhi *earnings management*.

2.2.22 Ukuran Komite Audit Terhadap Hubungan Asimetri Informasi dan *Earnings Power* Dengan *Earnings Management*

Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Keberadaan komite audit yang memiliki tugas membantu dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam hal penyajian laporan keuangan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen. Hal ini berdasarkan peraturan BI No.8/4/PBI/2006 menyatakan tentang tugas komite audit adalah melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan proses pelaporan keuangan.

Penelitian mengenai komite audit diantaranya dilakukan oleh Xie *et al* (2003), Wedari (2004), Veronica dan Bachtiar (2004) dan Nasution dan Doddy

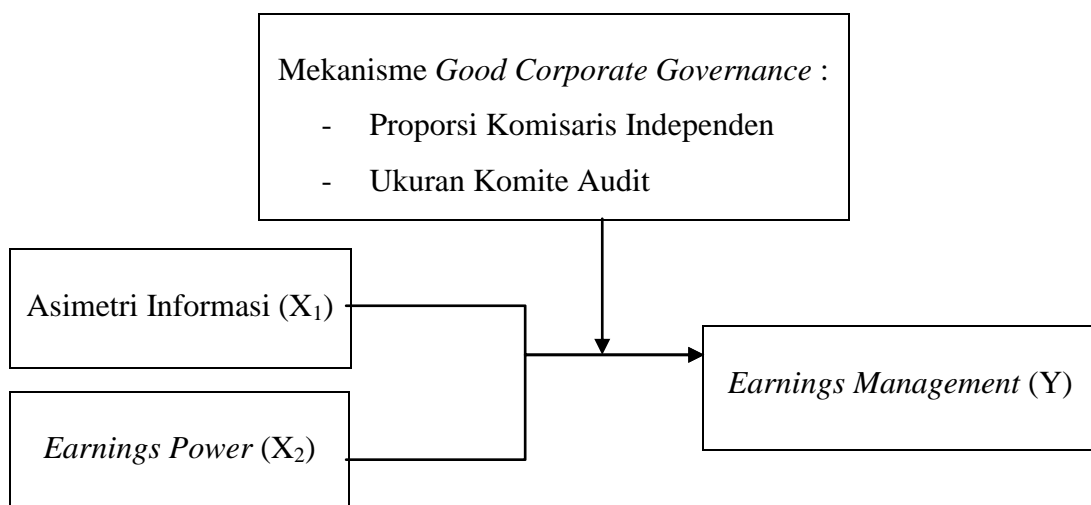
(2007). Secara keseluruhan, hasil penelitian-penelitian tersebut menunjukkan kesimpulan bahwa keberadaan komite audit dapat menghambat terjadinya *earnings management* dan komite audit yang berasal dari luar mampu untuk melindungi kepentingan pemegang saham dari praktik *earnings management* yang dilakukan oleh pihak manajemen. Komite audit yang dipilih oleh dewan komisaris diharapkan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam pelaksanaan tugasnya, komite audit dengan proporsi anggota eksternal yang cukup besar dengan pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan perusahaan dan keuangannya, diharapkan dapat mengurangi praktik *earnings management* dalam perusahaan (Iqbal, 2007:7).

Keberadaan komite audit membantu dewan komisaris untuk mengawasi manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Anggota komite audit adalah orang-orang independen. Komite audit juga secara aktif melakukan pertemuan dengan pihak manajemen, auditor internal, dan auditor eksternal (Sanjaya, 2008:102). Komite audit bertanggung jawab untuk mengawasi laporan keuangan, mengawasi audit eksternal, dan mengamati sistem pengendalian internal (termasuk audit internal) dapat mengurangi sifat *opportunistic* manajemen dengan cara mengawasi laporan keuangan dan melakukan pengawasan pada audit eksternal. Keberadaan komite audit diharapkan dapat menemukan sejak dini praktik-praktik yang bertentangan dengan asas keterbukaan informasi, sehingga diharapkan dapat mengurangi praktik *earnings management*.

2.3 Kerangka Pemikiran

Menurut Arikunto (2005:98) kerangka pemikiran adalah bagian teori dari penelitian yang menjelaskan tentang alasan atau argumentasi bagi rumusan hipotesis. Kerangka pemikiran menggambarkan alur pikiran peneliti dan memberikan penjelasan kepada orang lain mengapa penulis mempunyai anggapan seperti yang disampaikan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah mekanisme *corporate governance* meliputi asimetri informasi dan *earnings power*, variabel dependennya adalah *earnings management* dan variabel moderasi adalah proporsi komisaris independen dan komite audit. Penelitian ini digunakan untuk menguji apakah mekanisme *good corporate governance*, dalam hal ini proporsi komisaris independen dan komite audit berpengaruh terhadap hubungan asimetri informasi dan *earnings power* dengan *earnings management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan teori tersebut, maka kerangka pemikiran digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : dikembangkan untuk penelitian

2.4 Hipotesis Penelitian

Menurut Narimawati (2008:20), hipotesis merupakan ungkapan berupa jawaban sementara atas masalah penelitian yang diturunkan dari kerangka pemikiran dan harus di uji kebenarannya secara empiris melalui suatu analisis. Berdasarkan asumsi teoritis dan kerangka berpikir, maka peneliti akan menghadirkan suatu hipotesis yang akan diuji kebenarannya dengan menggunakan fakta-fakta yang diperoleh dari penelitian, antara lain :

H_{1a} : Asimetri informasi berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H_{1b} : *Earnings power* berpengaruh terhadap *earnings management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H_{2a} : Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap hubungan antara asimetri informasi dengan *earnings management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H_{2b} : Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap hubungan antara *earnings power* dengan *earnings management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H_{3a} : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap hubungan antara asimetri informasi dengan *earnings management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

H_{3b} : Ukuran komite audit berpengaruh terhadap hubungan antara *earnings power* dengan *earnings management* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia